

**KONVERSI AGAMA DAN FORMASI IDENTITAS:
Tionghoa Muslim Kudus Pasca-Indonesia Orde Baru***

Oleh :

Rabith Jihan Amaruli, Mahendra Pudji Utama
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, SH Tembalang Semarang 50275
E-mail: rabith_jihan@yahoo.com
maheutama@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses about religion conversion and assimilation dilemma in Kudus Chinese Moslem. As a reality there is no guarantee that the assimilation will be finish with the conversion of Chinese to the Islam. Hopefully, the understanding about plurality (kebhinekaan) will be a strong fundament in the cultural integration. This study found that the Chinese choose Islam, especially in post-New Order, caused by two main motivations coming from itself and environment. The relationship of post-conversion of Chinese muslim, made at a crossroad. On the one hand, the Chinese muslim still considered strange to some native communities. The still come under suspicion only purely politically and economically, while on the other hand their proximity to the government and the muslim community make them “shunned” by the Chinese people.

Keywords: *religious coversion, Chinese Muslim, Kudus, assimilation.*

I. PENDAHULUAN

Pada periode 1960-an hingga 1990-an, konversi ke Islam, setidaknya bagi sebagian orang Tionghoa, lebih banyak didorong oleh politik asimilasi yang digulirkan oleh pemerintah. Gejala yang sama dapat ditemukan di kalangan Tionghoa di Kudus (Amaruli dan Puguh, 2006). Konversi dalam garis asimilasi ternyata masih menyisakan dilema. Pelabelan negatif terhadap Tionghoa muslim masih melekat dalam benak sebagian masyarakat Indonesia. Kehadiran mereka masih dianggap aneh: “Cina kok muslim” (Afif, 2012: 146). Di sisi lain, kendati telah hidup berdampingan dengan masyarakat bumiputera selama puluhan atau bahkan

ratusan tahun, sebagian warga Tionghoa masih cenderung menutup diri (Afif, 2012: 133). Meskipun demikian, konversi ke Islam sampai pada masa pasca-Orde Baru masih menjadi salah satu modus yang dipilih oleh warga komunitas Tionghoa untuk melakukan pembauran. Persoalan yang perlu dicermati adalah bagaimana dalam proses pembauran itu tetap tersedia ruang khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan mereka dapat diekspresikan dan diapresiasi.

Konversi agama (*religious conversion*) dapat didefinisikan sebagai “*transfer of primary religious affiliation*” yang merujuk pada transformasi psikologis

* Artikel ini didasarkan pada Laporan Hibah Penelitian Pembinaan DIPA PNBPU Undip Tahun 2012 dengan judul “Konversi Agama dan Dilema Asimilasi: Strategi Integrasi Tionghoa Muslim Kudus dalam Konteks Kebhinekaan”.

dan spiritual mendasar pada tataran individual yang ditandai dengan pergantian atau peralihan orientasi dari keyakinan semula ke keyakinan yang lain. Oleh karena itu, khususnya dalam retorika Kristen Evangelis, konversi agama disebut sebagai perubahan yang radikal, tiba-tiba, dan total dalam kehidupan seseorang (Peel, 1977: 108). Dalam kenyataan tentu tidak selalu demikian. Bagaimanapun, konversi agama merupakan fenomena yang kompleks. Pertama, konversi agama bukan hanya berurusan dengan usaha mengadopsi sistem pengetahuan dalam agama baru, tetapi dibarengi dengan usaha menjadikannya sebagai pandangan dunia dan identitas baru. Dalam konteks itu, pengaruh kepercayaan awal tidak mudah hilang begitu saja saat seseorang memutuskan untuk melakukan konversi. Simbol-simbol dan praktik-praktik dalam setiap agama dikembangkan dalam konteks historis yang spesifik, sehingga pemaknaan terhadapnya dapat berbeda antara pemeluk asli dengan pemeluk baru melalui konversi (Norris, 2003: 170-171). Kedua, kebanyakan orang justru mengalami transformasi psikologis dan spiritual dalam waktu yang lama dan melalui proses yang panjang. Kadang-kadang perubahan itu juga tidak benar-benar radikal dan total 180 derajat (Brown (2003: 143). Ketiga, dalam konversi agama berlangsung serangkaian proses seperti pembentukan identitas, pembelajaran teks agama, dan penataan sosial baru. Lebih jauh lagi, konversi agama dapat merefleksikan pola-pola relasi baru antara negara dan warganya, bentuk-bentuk baru politik identitas, perbedaan aspirasi politis, dan gugatan terhadap otoritas teks agama. Oleh karena itu, konversi agama kiranya lebih tepat jika dilihat sebagai proses yang terus berjalan: “*turning from and to*” (Rambo, 2003: 214) atau sebagai “*a form of passage*” (Austin-Bross, 2003: 1), dan bukan sebagai ‘produk jadi’ atau proses yang sudah selesai.

Persoalan konversi agama menjadi menarik terutama jika dikaitkan dengan eksistensi Tionghoa sebagai etnis yang khas.

Etnis cenderung mempertahankan eksistensi mereka dengan mengembangkan berbagai cara sebagai mekanisme untuk memelihara identitas etnis mereka (Rosman, Rubel, dan Weisgrau, 2009: 337). Dalam konteks etnis Tionghoa di Indonesia, usaha untuk menjaga identitas etnis juga dapat dihubungkan dengan kepentingan mereka untuk menyambung dan/atau memper-tahankan ikatan dengan tanah asal (leluhur). Pada titik ini, kelompok etnis dapat dipahami sebagai kategori sosial yang mengacu pada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terbentuk berdasar ikatan primordial. Anggota suatu kelompok etnis memiliki persepsi bahwa mereka memiliki kesamaan berkenaan dengan pengalaman historis, nenek moyang, sistem budaya, dan bahasa. Sentimen primordial itu juga dipakai sebagai pijakan bagi suatu kelompok etnis untuk menyatakan bahwa mereka berbeda atau terpisah dari, dan hal itu diakui pula oleh, kelompok etnis yang lain. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa dalam etnisitas terkandung komponen psikologis atau emosional yang kuat yang membuat warga suatu masyarakat dapat memilah ke dalam dua kategori oposisional: ‘kami’ dan ‘mereka’ (Rosman, Rubel, dan Weisgrau, 2009: 326).

Berangkat dari definisi itu, setidaknya ada dua atribut utama yang dapat dipa-kai untuk membantu mengidentifikasi keberadaan suatu kelompok etnis, yaitu sejarah kolektif atau mitos tentang asal-usul dan tanda-tanda batas etnis. Sejarah kolektif suatu kelompok etnis dapat digunakan sebagai pijakan untuk menetapkan sub-sub kelompok mana yang tercakup atau dapat dimasukkan sebagai bagian dari suatu kelompok etnis. Penerimaan bersama terhadap sejarah kolektif yang berfungsi seba-gai mitos tentang asal-usul juga dijadikan dasar untuk mendukung klaim suatu ke-lompok etnis atas budaya umum dan untuk meneguhkan posisi mereka sebagai bagian dari kelompok kekerabatan yang lebih luas (Tonkin, McDonald, dan Chapman, 1989). Dalam garis ini etnisitas mengekspresikan perbedaan kultural secara internal atau, dengan kata lain, merupakan

konsep emik tentang perbedaan budaya yang didasarkan pada organisasi sosial dengan mengacu pada kekerabatan dan aturan-aturan dalam adat perkawinan di tanah asal (Eriksen, 2001: 265). Sementara itu tanda-tanda batas etnis selain digunakan untuk mengidentifikasi anggota suatu ke-lompok etnis juga penting untuk menunjukkan identitas mereka saat berhadapan dengan kelompok lain (Peoples dan Bailey, 2012: 390-391).

Berangkat dari pemahaman itu, dalam artikel ini akan dibahas tentang konversi agama dan formasi identitas komunitas Tionghoa di Kudus pasca-Orde Baru. Data untuk artikel ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dipandang paling sesuai dalam ilmu sosial budaya (Bachtiar, 1981: 137-161) difokuskan pada pola pemukiman, budaya material, aktivitas sehari-hari, dan interaksi di antara Tionghoa muslim dan antara mereka dengan Tionghoa nonmuslim dan etnis muslim lain (Jawa). Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang sistem budaya komunitas Tionghoa, motivasi mereka untuk melakukan konversi, dan pandangan mereka terhadap komunitas Tionghoa nonmuslim dan etnis Jawa. Wawancara dilakukan secara mendalam agar dalam waktu yang relatif singkat dapat diperoleh cukup banyak informasi (Koentjaraningrat, 1981: 162-196; Moleong, 2004: 132). Sementara itu studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku, hasil-hasil penelitian sejenis, dan dokumen-dokumen (Kartodirdjo, 1981: 61-92). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Mengikuti Miles dan Huberman (1992: 16-19), analisis kualitatif dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

II. MENJADI MUSLIM

Salah satu topik penting yang mendapat banyak perhatian dari para peneliti

dalam kajian tentang konversi agama adalah motivasi untuk berganti orientasi dari keyakinan semula ke keyakinan yang baru (Rambo, 1993: 137). Konversi ke Islam di kalangan komunitas Tionghoa dipengaruhi oleh kebijakan asimilasi, dan karena itu menjadi muslim dapat dilihat sebagai strategi mereka untuk menjalankan asimilasi. Namun demikian, ada pula orang Tionghoa di Kudus yang memutuskan untuk memeluk Islam karena didorong oleh keinginan untuk mengatasi gejolak batiniah yang berpangkal dari keraguan terhadap kepercayaan mereka semula. Mereka dengan kesadaran sendiri rela meninggalkan agama yang semula mereka anut untuk kemudian beralih ke Islam. Motivasi diri ini menjadi semacam panggilan iman atau tauhid. Ini merupakan pengalaman spiritualistik individual, yang kadang-kadang menentukan keputusan seseorang untuk melakukan konversi agama. Motivasi serupa itu dapat muncul dari perenungan pribadi atau dari hasil membaca buku-buku. Bahkan, ada pula orang Tionghoa yang menyatakan masuk Islam setelah mengalami pengalaman gaib bertemu dengan Nabi Khidir (Wawancara dengan Ja'far, 13 Juni 2012).

Rasa kurang puas terhadap kepercayaan yang semula dianut memunculkan berbagai pertanyaan mendasar dalam beragama dan ketertarikan untuk masuk Islam. Husein, misalnya, mengatakan bahwa Islam adalah agama yang rasional dan lengkap. Segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan masalah ketuhanan dan kemasyarakatan mampu dijawab oleh Islam dengan rasional dan bijak. Islam juga merupakan agama yang komplet karena memiliki aturan-aturan yang jelas dan lugas dari bangun tidur sampai berangkat tidur lagi, dari semenjak bayi dalam rahim ibu sampai manusia berada di liang lahat (Wawancara dengan Husein, 18 Juni 2012).

Orang-orang Tionghoa sebelum masuk Islam biasanya telah mengenal ajaran Islam dalam waktu yang cukup lama.

Dengan demikian, keputusan mereka untuk melakukan konversi ke Islam telah melalui proses yang lama. Ajaran Islam yang mula-mula mereka kenal terutama mengenai keimanan. Orang-orang yang menjadi perantara bagi mereka untuk mengenal ajaran Islam sebagian besar bukan berasal golongan penyiur agama, melainkan teman akrab di samping anggota keluarga. Pada masa sebelum Orde Baru, Tionghoa muslim di Kudus kebanyakan berasal dari keluarga ayah dan ibu keturunan Tionghoa *totok*, yaitu dari suku Hok Kian, Hok Jia, Hinwa, Shein Ong; dan sebagian lagi keturunan peranakan atau campuran antara *totok* dan peranakan (Wawancara dengan Hasan, 17 Juni 2012). Keluarga Tionghoa memiliki sikap yang cenderung toleran terhadap agama lain. Mereka membebaskan anak-anaknya untuk memilih agama yang disukai. Tentu, ada juga keluarga yang bersikap keras terhadap anggotanya yang memutuskan untuk memilih Islam. Sikap keras itu ditunjukkan mulai dari pengucilan dan dikeluarkan dari keluarga besar sampai dengan tindakan fisik. Pada masa pasca-Orde Baru, Tionghoa muslim di Kudus umumnya memiliki ayah dan ibu yang telah memeluk Islam. Tionghoa muslim yang benar-benar baru, yakni yang berasal dari keluarga non-Islam dapat dihitung dengan hitungan jari (Wawancara dengan Ja'far, 13 Juni 2012).

Lingkungan masyarakat sekitar di mana mereka tinggal juga turut andil dalam proses konversi ke Islam. Masyarakat Kudus yang mayoritas memeluk Islam mempunyai pengaruh yang kuat terhadap komunitas minoritas Tionghoa untuk berpindah keyakinan ke Islam. Seperti dialami oleh Husein, semenjak usia 17 tahun ia dibebaskan oleh ayahnya untuk memilih agama apa saja dengan syarat ia serius menjalankan ajaran agama pilihannya. Pergaulan yang akrab dengan teman sekolah yang muslim membuatnya yakin untuk menjatuhkan pilihan ke Islam. Ia tidak bisa menolak "takdir sosial", menjadi Islam karena pengaruh lingkungan sosial. Ada

beberapa keluarga Tionghoa muslim yang semula beragama non-Islam, tetapi karena kepala keluarga mereka memilih Islam, maka istri dan anak-anak mereka pun mengikuti untuk memeluk agama Islam. (Wawancara dengan Husein, 11 Juni 2012).

Lingkungan pendidikan juga mempengaruhi seseorang untuk memilih Islam. Sampai pada masa akhir Orde Baru, mayoritas orang Tionghoa di Kudus menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah umum, baik itu sekolah negeri maupun swasta berbasis agama baik di Kudus maupun di luar kota. Di sekolah ini mereka banyak bergaul dengan guru-guru dan teman-teman muslim. Dari lingkungan sekolah ini mereka mendapat informasi mengenai Islam, sehingga lambat laun mereka tertarik pada Islam. Orang Tionghoa muslim, seperti orang Tionghoa lainnya, pada awalnya tidak menganggap penting terhadap pendidikan formal. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang bersekolah pada akhirnya akan dihadapkan pada persoalan mencari pekerjaan, sementara hal yang dipandang penting untuk mendapatkan pekerjaan adalah kemampuan untuk melakukan praktik. Namun demikian, pandangan orang Tionghoa muslim dari generasi pasca-Orde Baru telah memperlihatkan perubahan. Mereka menganggap bahwa pendidikan formal maupun informal penting bagi anak-anak mereka. Mereka juga mengusahakan dan mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi baik di Kudus maupun di kota lain seperti Semarang dan Yogyakarta.

Ikatan perkawinan turut mempengaruhi seseorang untuk masuk ke Islam. Melalui perkawinan mereka sekaligus sudah masuk Islam, karena mereka harus berikrar di hadapan petugas (penghulu) untuk menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Dalam Islam, seorang muslim tidak diperbolehkan menikah dengan orang non-Islam, dan ini merupakan syarat mutlak bagi seorang muslim yang hendak melakukan pernikahan. Sebagian dari mereka ada yang

meneruskan untuk mempelajari Islam secara lebih baik meskipun tidak bisa dikatakan mayoritas. Mereka yang masuk Islam melalui perkawinan juga berpotensi untuk kembali pada agama asal mereka, terutama ketika mereka mengalami perceraian. Hal ini tentunya juga disebabkan oleh kurangnya motivasi (baik dari diri sendiri maupun keluarga) dan intensitas “pembinaan iman”.

Perkawinan campuran banyak dilakukan terutama dalam dekade 1980-an dan 1990-an, periode ketika kampanye pembauran melalui perkawinan banyak digembar-gemborkan. Menurut pengakuan Ali, perkawinan campuran bagi sebagian Tionghoa muslim di Kudus memiliki tendensi tertentu terutama di bidang ekonomi. Dalam periode itu diberlakukan pelarangan pemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) bagi WNA termasuk orang Tionghoa. Proses jual-beli tanah yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa dapat menjadi urusan yang sangat rumit dan memakan banyak biaya. Untuk menyiasatinya, orang-orang Tionghoa melakukan perkawinan dengan laki-laki atau perempuan dari etnis lain yang secara umum disebut bumiputera, terutama Jawa. Urusan jual-beli tanah itu kemudian diserahkan kepada suami atau istri yang bumiputera itu. Melalui perkawinan campuran itu pula orang-orang Tionghoa masuk ke Islam karena laki-laki atau perempuan bumiputera yang menjadi suami atau istri mereka berasal dari kalangan muslim (Wawancara dengan Ali, 19 Juni 2012).

Sebelum menjadi pemeluk Islam, orang-orang Tionghoa muslim di Kudus menganut sistem keyakinan yang berbeda-beda. Ada yang mengikuti Kong Hu Cu, Budha, Protestan, dan Katolik. Agama asal itu mempengaruhi lingkungan keberagaman Tionghoa muslim di dalam keluarga. Dalam satu keluarga, ada yang semuanya muslim dan ada pula yang berbeda agama. Hal itu mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Tionghoa muslim yang hidup dalam

keluarga multiagama lebih banyak menghadapi kesulitan termasuk beribadah agar tidak menyinggung perasaan dan dapat diterima secara baik oleh anggota keluarga yang lain. Tionghoa muslim yang aktif mengikuti kegiatan sosial keagamaan juga dibatasi oleh kondisi keluarga yang masih membutuhkan pendekatan-pendekatan khususnya untuk menjelaskan Islam. Kesulitan semacam itu tidak dialami oleh mereka hidup dalam keluarga yang seluruh anggotanya muslim. Kalangan Tionghoa muslim juga menemui sejumlah kesulitan yang terkait dengan praktik keislaman, misalnya membaca Al-Quran, menghafalkan bacaan shalat, melakukan puasa, dan memahami ajaran tentang hukum Islam.

III. FORMASI IDENTITAS KETIONGHOAAN

Iklm kebebasan dalam Indonesia pasca-Orde Baru direspon oleh kalangan Tionghoa muslim dengan usaha untuk memperkuat konsolidasi dan merumuskan orientasi gerakan secara lebih sistematis. Pada 23 Maret 2005, DPD Persatuan Islam Tionghoa Indonesia/ Pembinaan Iman Tauhid Islam (PITI) Jawa Tengah menyelenggarakan musyawarah wilayah dengan agenda utama merumuskan strategi-strategi gerakan yang diharapkan lebih mampu mewujudkan suasana saling menghormati dan kerja sama antara masyarakat Tionghoa muslim dan bumiputera. Kegiatan ini diikuti oleh anggota DPD PITI dari berbagai kota di Jawa Tengah, antara lain dari Salatiga, Jepara, Purwokerto, Rembang, dan Blora. PITI Kudus sebagai kelanjutan dari organisasi Tionghoa muslim sebelumnya, yakni Mata Mustika dan JMP, turut hadir dalam acara itu. Beberapa tokoh penting Tionghoa muslim Jawa Tengah juga hadir dalam acara itu, antara lain H. Fuad Sahil, Jaisar Amit, Maksum Pinarto, Gautama Setiadi, Harry Afandi, dan Iskandar. Salah satu butir penting yang dihasilkan dari musyawarah wilayah itu adalah

disepakatinya pembangunan *Islamic Center* yang rencananya akan dibangun di Semarang. *Islamic Center* diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan dan pembelajaran pengetahuan keislaman bagi orang-orang Tionghoa muslim di Jawa Tengah (“Muswil PITI akan Diselenggarakan 23 Maret 2005”, dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/22/nas19.htm>, diunduh pada 23 Maret 2012).

Pada tahun yang sama DPP PITI juga menyelenggarakan Musyawarah Nasional III di Surabaya. Munas yang kemudian menetapkan H.M. Trisno Adi Tantiono sebagai Ketua Umum DPP PITI ini dapat dianggap sebagai momen paling bersejarah bagi masyarakat Tionghoa muslim Indonesia pasca-Orde Baru. Melalui forum ini dapat dilahirkan kesepakatan tentang penggunaan kembali kata Tionghoa dalam nama PITI. Tanda-tanda aktivitas komunitas Tionghoa muslim Indonesia yang semakin menggeliat pun mulai terasa, setidaknya jika dilihat dari pembangunan masjid dan pusat keislaman di beberapa daerah, antara lain Masjid Cheng Ho di Surabaya, Semarang, Purbalingga, Bandung, dan Palembang; Masjid Jami An-Naba’ K.H. Tan Shin Bie di Purbalingga, dan *Islamic Center* di Kudus (http://www.muslimtionghoa.com/index.php?action=generic_content.main&id_gc=46, diunduh pada 23 Maret 2012).

PITI Kudus sebagai satu-satunya organisasi Tionghoa muslim di Kudus, semula dirintis oleh orang-orang non-Tionghoa. Akan tetapi dalam perkembangan orang-orang Tionghoa muslim telah melibatkan diri secara aktif dalam organisasi itu. Jumlah anggota PITI secara kuantitatif mengalami penurunan yang dibarengi pula dengan menurun aktivitasnya. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh hubungan yang kurang harmonis di antara para tokoh-tokoh Islam di Kudus. Ketidakharmisan tersebut merupakan akibat lebih lanjut dari perbedaan pendapat antargolongan dalam Islam, misalnya antara NU dan Muhammadiyah, di samping konflik

kepentingan dan bahkan konflik ideologi partai.

Setelah bertahun-tahun mati suri, PITI Kudus sejak akhir 2011 mulai dibangkitkan lagi dengan tetap tidak melibatkan diri dalam aktivitas politik praktis. Hal ini sesuai dengan amanat Imam Besar DPP PITI, yaitu Anton Medan, yang menyatakan bahwa PITI di manapun harus bersih dari keterlibatan politik kepartaian. Akan tetapi, sebagai individu, anggota PITI tetap diperbolehkan untuk aktif dalam kegiatan politik praktis. Hal yang harus ditekankan adalah aktivitas politik yang dilakukan oleh individu-individu itu tidak boleh dibawa ke dalam dan mengganggu PITI (Wawancara dengan Husein, 18 Juni 2012). Oleh karena itu, pengurus PITI Kudus juga menanggapi secara positif terhadap pemerintah yang nyaris tidak memberi kontribusi apapun terhadap organisasi itu. Pengurus PITI juga merasa khawatir jika pemerintah berkeinginan untuk memberi bantuan, misalnya dana. Hal itu semacam itu dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk untuk menjadikan PITI sebagai alat politik, yang bisa saja kontraproduktif bagi keberlangsungan organisasi itu. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kesan PITI untuk menghindari aktivitas politik praktis tidak bisa dimaknai bahwa Tionghoa muslim Kudus alergi terhadap politik. Dalam kenyataan, beberapa Tionghoa muslim Kudus aktif dalam kegiatan partai politik (Wawancara dengan Hasan, 14 Juni 2012).

Tionghoa muslim di Kudus melihat Islam sebagai jalan yang cukup efektif bagi mereka untuk menyatu ke dalam kehidupan masyarakat muslim tempat mereka menjadi anggotanya. Hal ini paling tidak ditandai dengan kesediaan dan keterbukaan Tionghoa muslim untuk bergaul langsung dengan masyarakat muslim baik dalam kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan. Dalam Islam sendiri terdapat pandangan mengenai perbedaan suku dan bangsa yang tidak diarahkan untuk memupuk sikap individualitis atau membentuk kelompok khusus secara

eksklusif melainkan untuk berintegrasi dan saling mengenal satu dengan yang lain. Dengan demikian, proses integrasi melalui agama Islam dalam kehidupan dua kelompok etnis (Jawa dan Tionghoa) memungkinkan untuk diwujudkan.

Alam politik yang semakin terbuka dan demokratis membuka peluang bagi orang-orang Tionghoa untuk menampilkan kekhasan mereka. Ini tampak misalnya dari sikap yang tidak canggung lagi untuk tetap mencantumkan nama Tionghoa mereka. Di pihak lain, Tionghoa muslim generasi pasca-Orde Baru menunjukkan kecenderungan untuk tidak memberi nama Tionghoa kepada anak-anak mereka. Alternatif nama yang diberikan adalah nama Indonesia atau nama Islam. Tambahan nama Muhammad banyak dipilih oleh para orang tua Tionghoa muslim untuk menamai anak mereka dengan alasan untuk mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad Saw. Panggilan *Koh* dan *Cik* sudah jarang digunakan untuk memanggil Tionghoa muslim, dan ini bahkan berlaku di antara mereka sendiri. Mereka lebih nyaman menggunakan panggilan Pak untuk Tionghoa muslim laki-laki dan Bu untuk Tionghoa muslim perempuan. Ada juga di antara mereka yang memanggil ustadz kepada Tionghoa muslim yang dikenal sebagai juru dakwah.

Hal yang menarik untuk disimak adalah hampir tidak ditemukan pelibatan upacara-upacara ketionghoan dalam kehidupan daur hidup Tionghoa muslim Kudus. Tampaknya mereka berusaha untuk sebisa mungkin sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan apa yang masyarakat bumiputra lakukan. Mungkin juga, menghilangnya adat-istiadat ketionghoan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa Tionghoa muslim generasi pasca-Orde Baru adalah Tionghoa peranakan yang lahir dan besar di Jawa dan telah lama bersosialisasi dan berasimilasi dengan adat-istiadat masyarakat Jawa. Apalagi, Tionghoa muslim baru di Kudus tidak selalu berlatar belakang Kong Hu Cu, melainkan sudah menjadi pemeluk agama lain seperti Kristen

dan Katolik yang memiliki akar tradisi sendiri. Hal ini membuat tata cara hidup, berbahasa, dan berkomunikasi Tionghoa muslim lebih dekat pada masyarakat setempat.

Tionghoa muslim Kudus dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan orientasi yang kuat pada kebudayaan Tionghoa. Husein, misalnya, lebih tampak sebagai laki-laki Jawa daripada Tionghoa. Ikatan dengan kebudayaan Tionghoa yang semakin longgar disebabkan oleh lingkungan sosial dan keluarganya yang lebih mengacu pada kehidupan masyarakat Jawa, mengingat Husein sejak kecil sudah hidup di lingkungan Jawa. Hal ini juga disebabkan oleh keinginannya untuk menjadi muslim yang baik. Baginya, menjadi muslim yang baik berarti melepaskan diri dari tradisi leluhur yang tidak Islamis. Tionghoa muslim yang masih melibatkan tradisi leluhur dalam menjalankan kehidupannya, bagi Husein, perlu dipertanyakan kembali apakah ia serius atau tidak dalam menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, dalam menjalankan upacara daur hidup, seperti *lairan*, *sunatan*, *nikahan*, dan kematian, Husein lebih memilih mengikuti anjuran yang dicontohkan oleh nabi melalui hadits (Wawancara dengan Husein, 18 Juni 2012).

Tionghoa muslim menyadari bahwa menjadi muslim bukan lagi merupakan urusan pribadi, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi terkait pula dengan kehidupan sosial yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ritualisme dan unsur-unsur keberagamaan yang lain, seperti yang mewujud dalam perkumpulan yasin dan tahlil, perkumpulan (persaudaraan) *thariqat*, dan jamaah pengajian. Bentuk perilaku sosial keberagamaan lain yang tampak pada Tionghoa muslim di Kudus adalah arisan Rukun Tetangga (RT), kerja bhakti, shalat berjamaah, dan menjadi *takmir* masjid di lingkungan mereka.

Dilihat dari status ekonomi, Tionghoa muslim Kudus pasca-Orde Baru menunjukkan hal yang berbeda. Jika

Tionghoa muslim di Kudus pada masa Orde Baru didominasi oleh orang-orang Tionghoa muslim golongan menengah ke bawah, pada pasca-Orde Baru justru diwarnai dengan masuknya beberapa pengusaha besar Tionghoa ke dalam agama Islam, seperti Peter yang kemudian menjadi Ketua PITI Kudus. Ia dikenal sebagai pengusaha rokok yang sangat sukses di Kudus. Rumahnya yang megah di wilayah Kaliwungu Kudus dapat menegaskan posisi sosialnya itu. Bahkan, beberapa Tionghoa muslim yang sebelumnya menjadi karyawan di sebuah perusahaan dan memutuskan untuk menjadi pengusaha mandiri, saat ini menjadi pengusaha yang sukses di Kudus. Hal ini meruntuhkan anggapan yang sempat berkembang di kalangan Tionghoa bahwa menjadi muslim merupakan tanda-tanda kebangkrutan ekonomi.

Orang Tionghoa muslim merasa lebih bisa diterima dan dipersepsi secara positif oleh orang-orang bumiputera ketika mereka berkecimpung di bidang profesi yang umumnya juga ditekuni oleh orang-orang bumiputera. Sebenarnya, dengan menyangand identitas sebagai muslim pun mereka merasa sudah lebih bisa diterima, apalagi ketika mereka menekuni pekerjaan-pekerjaan yang sering dikaitkan dengan orang-orang bumiputera. Kondisi ini menggambarkan bahwa prasangka dan diskriminasi yang sering mereka terima sebenarnya bukan semata dipicu oleh persoalan perbedaan etnis dan agama, tetapi juga erat kaitannya dengan perbedaan profesi yang berujung pada perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi antara mereka dengan penduduk bumiputera. Kesenjangan ekonomi yang cukup mencolok tidak bisa dipungkiri telah membuat orang-orang bumiputera cemburu terhadap mereka, hingga kemudian muncul stereotip negatif terhadap orang Tionghoa, seperti rakus dan egois. Itulah sebabnya, ketika orang-orang Tionghoa yang menekuni profesi selain di bidang bisnis, orang-orang bumiputera cenderung melihat mereka sebagai pengecualian, apalagi jika

mereka sekaligus seorang muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua belah pihak sejauh ini memang sarat akan prasangka dan kecurigaan.

Prasangka negatif terhadap orang-orang Tionghoa memang tidak mudah dihilangkan, apalagi jika kebetulan mereka kaya raya. Ditambah lagi pola hidup sebagian orang Tionghoa yang cenderung eksklusif dan kurang bergaul dengan penduduk bumiputera. Di kalangan orang Tionghoa sendiri masih ada yang memiliki pandangan rendah terhadap kalangan bumiputera. Sebagai contoh, ada orang Tionghoa kaya yang mempekerjakan orang-orang Jawa dan memper-lakukan mereka layaknya pembantu. Perlakuan semacam ini dapat menyebabkan masyarakat bumiputera membenci orang-orang Tionghoa, dan tidak mudah dihilangkan kendati orang Tionghoa yang kaya itu kemudian masuk Islam. Akan tetapi, hal itu berbeda ketika orang Tionghoa yang masuk Islam bukanlah dari golongan orang kaya, misalnya pekerja biasa. Persamaan derajat ekonomi seperti ini ternyata menjadi salah satu sebab mereka diterima oleh bumiputera. Perasaan bahwa mereka berasal dari derajat yang sama juga mengikis rasa iri dan cemburu dari masyarakat bumiputera. Oleh karena menjadi salah satu sumber kecemburuan yang paling besar, maka jenis pekerjaan bagi sebagian orang Tionghoa muslim dianggap sebagai hal yang penting.

Sekalipun iklim demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru telah memberi kesempatan bagi orang-orang Tionghoa muslim untuk menunjukkan identitas dan pandangan-pandangan mereka secara lebih terbuka, hal ini bukan berarti tidak ada lagi masalah serius yang mereka hadapi. Posisi mereka tetap berada di simpang jalan. Di satu sisi, keputusan untuk memeluk Islam dapat semakin mendekatkan mereka dengan pemerintah dan masyarakat bumiputera. Namun, di sisi yang lain, mereka menghadapi situasi baru yang cukup dilematis, yakni hubungan mereka dengan orang-orang Tionghoa terancam memburuk.

Jika mereka terlalu dekat dengan pemerintah dan masyarakat bumiputera maka hal ini dikhawatirkan akan mengganggu hubungan mereka dengan orang-orang Tionghoa non-muslim. Sementara itu jika terlalu dekat dengan orang-orang Tionghoa, mereka kemudian akan rentan terhadap prasangka-prasangka negatif dari masyarakat bumiputera, misalnya anggapan memilih Islam hanyalah jalan untuk mencari posisi aman.

Dengan demikian, menjadi muslim tidak selalu bermakna telah purnanya asimilasi orang-orang Tionghoa ke dalam masyarakat bumiputera. Perubahan-perubahan mendasar yang berlangsung pasca-Orde Baru menyediakan berbagai alasan bagi mereka untuk membangun dan/atau memilih identitas. Konversi agama ke Islam, dengan demikian tidak selalu dapat dilihat sebagai cara untuk “menjadi bumiputera”. Perubahan politik ke arah yang semakin demokratis dan penghargaan terhadap perbedaan etnis dan budaya sebagai fenomena penting dalam Indonesia pasca-Orde Baru telah membuka peluang bagi orang Tionghoa muslim untuk tidak lagi menutupi ketionghoan mereka. Mereka tidak bisa lagi dipaksa untuk menghapus kekhasan budaya yang mereka miliki, apalagi jika hal itu berhubungan dengan kepercayaan-kepercayaan yang telah mereka warisi dari leluhur mereka. Oleh karena itu, bahkan di kalangan Tionghoa muslim Kudus yang sudah menjadi muslim sejak lama dan dalam banyak hal telah mengikuti cara hidup dan kebiasaan orang Jawa, ketika ada kesempatan untuk merayakan hari-hari besar Tionghoa, atau apa pun yang berhubungan dengan Tionghoa, mereka tidak lagi menutupi rasa antusias dan kegembiraan mereka. Ini merupakan pengalaman baru bagi mereka, dan mereka menikmatinya. Seorang informan menggambarkan: “kami pernah kehilangan barang berharga untuk waktu yang lama, dan sekarang barang berharga itu sudah kembali lagi” (Wawancara dengan Hasan, 18 Juni 2012).

Kebijakan diskriminatif yang berlangsung sejak kolonialisme Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru masih menyisakan dampak negatif hingga tahun-tahun belakangan ini, tidak terkecuali bagi orang-orang Tionghoa muslim. Tidak sedikit orang Tionghoa yang memutuskan memeluk Islam kemudian mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari saudara-saudara mereka yang non-muslim karena mereka dianggap lebih memilih untuk menjadi bumiputera. Hal ini terjadi karena Islam sudah terlanjur dianggap identik dengan masyarakat bumiputera, yang di mata orang-orang Tionghoa pada umumnya dipandang sebagai kelompok yang terbelakang, bodoh, malas, dan juga miskin. Itulah sebabnya sebagian besar orang Tionghoa cenderung tidak merestui jika ada salah seorang anggota keluarga mereka yang memutuskan masuk Islam (Wawancara dengan Fatimah, 18 Juni 2012).

Kecenderungan memandang rendah terhadap masyarakat bumiputera bukanlah fenomena baru di kalangan orang-orang Tionghoa. Kebanyakan mereka cenderung resisten terhadap agama Islam. Kondisi ini disebabkan oleh belum hilangnya stereotip-stereotip negatif tentang Islam yang diasosiasikan dengan penduduk bumiputera, yang terbelakang, malas, miskin, tidak toleran, keras, dan senang menjalankan poligami (Elizabeth, 2013: 182). Sebuah sikap dan pandangan yang tidak lebih diwarisi dari masa kolonialisme Belanda. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika kebanyakan orang Tionghoa di Indonesia melarang anggota keluarga mereka untuk memeluk Islam, bahkan sering disertai dengan ancaman akan mengeluarkan pelaku dari keanggotaan dalam keluarga besar mereka (The Siauw Giap, 1993: 63). Bagi orang Tionghoa muslim di Kudus, pendapat yang merendahkan tersebut sudah tidak relevan lagi dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru. Ketakutan orang Tionghoa bahwa mereka yang masuk Islam menjadi terpuruk dan miskin secara ekonomi terbukti tidak benar. Beberapa tokoh Tionghoa muslim

Kudus saat ini justru menunjukkan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, misalnya menjadi pengusaha sukses.

IV. SIMPULAN

Keputusan orang-orang Tionghoa di Kudus untuk melakukan konversi agama ke Islam dilatarbelakangi oleh motivasi yang beragam yaitu pengalaman spiritual yang bersifat personal dan pengaruh lingkungan keluarga serta masyarakat. Keinginan untuk melebur ke dalam kehidupan masyarakat muslim bumiputera, yang didorong oleh politik asimilasi, juga masih ditemukan di kalangan orang Tionghoa muslim.

Konversi ke Islam menimbulkan implikasi yang tidak sederhana bagi Tionghoa muslim dalam hubungan sosial dengan sesama orang Tionghoa maupun dengan masyarakat muslim bumiputera. Keputusan untuk menjadi muslim tidak selalu dapat diterima secara terbuka oleh anggota keluarga maupun kerabat yang

berbeda agama. Di sisi lain, kesamaan agama dengan mayoritas masyarakat bumiputera juga tidak selalu memberi jaminan bahwa Tionghoa muslim dapat terbebas dari prasangka negatif. Kondisi yang demikian merupakan akibat lebih lanjut dari politik asimilasi yang telah digulirkan sejak masa Orde Lama dan dipertahankan pada masa Orde Baru.

Perubahan-perubahan sejak awal masa Reformasi telah menciptakan ruang sosial yang menjadi semakin terbuka dan demokratis yang menjadi ladang subur bagi tumbuhnya multikulturalisme. Dalam konteks ini PITI dapat memainkan peranan yang lebih strategis. PITI bukan sekadar wadah dan sarana untuk melakukan pembinaan keimanan bagi kalangan Tionghoa muslim, tetapi juga sekaligus menyemai gagasan-gagasan dan langkah-langkah yang sistematis ke arah pembentukan masyarakat yang *bhinneka tunggal ika*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaruli, Rabith Jihan dan Dhanang Respati Puguh. 2006. "Pembauran Komunitas Tionghoa Muslim di Kudus 1961-1998", *Jurnal Kajian Kebudayaan Sabda*, 1(1): 6-21 (ISSN 1410-7910), hlm. 6-21.
- Budiman, Amen. 1979. *Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia*. Semarang: Tanjung Sari.
- Elizabeth, Misbah Zulfa. 2013. "Pola Penanganan Konflik Akibat Konversi Agama di Kalangan Keluarga Cina Muslim". *Walisongo*, Volume 21, Nomor 2, Mei 2013. Diunduh pada 13 September 2015.
- Kartodirdjo, Sartono. 1981. "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat. Editor. 1981. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1969. *Arti Antropologi untuk Indonesia Masa Kini*. Jakarta: LIPI.
- Koentjaraningrat. 1981. "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat. Editor. 1981. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (diindonesiakan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
- Norris, Rebecca Sachs. 2003. *Converting to What? Embodied Culture and the Adoption of New Beliefs*. Dalam: Andrew Buckser and Stephen D. Glazier (Ed.). 2003. *The Anthropology of Religious Conversion*. Lanham: Rowman & Littlefield Publisher, Inc., hlm., 171-182.
- Peel, J. 1977. *Conversion and Tradition in Two African Societies-Ijebu and Buganda*. Past and Present. 76: 108-141.
- Peoples, James dan Garrick Bailey. 2012. *Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology*, 9th edition. Belmont: Wadsworth
- Rosman, Abraham, Paula G. Rubel, and Maxine Weisgrau. 2009. *The Tapestry of Culture: An Introduction to Cultural Anthropology*, 9th edition. New York: AltaMira Press.
- The Siaw Giap. 1993. "Islam and Chinese Assimilation in Indonesia and Malaysia", dalam Chen Hok Tong. 1993. *Chinese Beliefs and Practices in Southeast Asia*. Selangor: Pelanduk Publication.
- The Siaw Giap. 1986. *Cina Muslim di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah.
- Tonkin, Elizabeth, Maryon Mcdonald and Malcolm Chapman, editor. 1989. *History and Ethnicity*. London: Routledge.
- Yahya, Junus. 1984. *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa: Rekaman Dakwah Islamiyyah 1979-1984*. Jakarta: YUI.
- "Muswil PITI akan Diselenggarakan 23 Maret 2005", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/22/nas19.htm>, Diunduh pada 21 Maret 2012.
- "Muslim Tionghoa", http://www.muslimtionghoa.com/index.php?action=generic_content.main&id_gc=46. Diunduh 21 Maret 2012.